

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
- Dr. Sumule Tumbo, SE., MM. "Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah." *Ilmu Pemerintahan*, 2019, 1–28.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, dan Fahima Diah Anisa. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hidayat, Syarifudin, dan Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Koesoemahatadja, RDH. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1979.
- Lukman Hakim. *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*. Pertama. Malang: Setara Press, 2011.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1988.

- Sarundajang, Sinyo Harry. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
- Soedjito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
- Sujarweni, V Wiratna. *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Tjandra, W. Riawan. *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Yogyakarta, 2009.
- Yani, Ahmad. *Pembentukan Undang-undang dan Perda*. Rajagrafindo Persada, 2011.

2. Jurnal

- Asmawi. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah.” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443>.
- Manan, Bagir. “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.” *PSH FH UII*, 2002, 136.
- Maros, Hikmah, dan Sarah Juniar. “Otonomi Daerah,” 2016, 1–23.
- Muliati, Muliati. “Administrasi Pemerintahan Daerah.” *Meraja journal* 2, no. 2 (2019): 101–8.
<https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/view/51%0Ahttps://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/51/42%0Ahttps://www.neliti.com/publications/284708/administrasi-pemerintahan-daerah%0Ahttps://core.ac.uk/download/pdf/234931668.pdf%0Ahttps://>
- Rohman, Hermanto. “Dinamika Politik Reformasi Anggaran Pro Rakyat: studi kepentingan politik Budget Actors dalam Pembahasan APBD Provinsi Jawa

Timur Tahun 2010.” UGM Yogyakarta, 2011.

S.A, Tessya Desvera, Untung Dwi Hananto, dan Untung Sri Hardjanto. “Pelaksanaan Tugas Anggota Dprd Dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2797–2809.

Setiadarma, Angela Andromeda. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/ Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Ekonomi* 21 (2013): 10–28.

Tambunan, Wahyu Donri. “Bab 2 Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru,” no. 4 (2013): 1. <http://e-journal.uajy.ac.id/323/>.

Trisnasari, Ni Komang Ayu Indah, dan I Ketut Sudiarta. “Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD dalam Pembentukan APBD Untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah di Provinsi Bali.” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 7 (2019): 1–14.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/52206>.

Yuniarto, Saiful Rahman. “Struktur, Penyusunan Dan Penetapan APBD.” *E-jurnal Universitas Brawijaya*, 2019, 5.

3. Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah

4. Internet

Antara Jateng, “Penyusunan APBD Jateng 2023 antisipasi ketidakpastian global”, diakses dari <https://jateng.antaranews.com/berita/466569/penyusunan-apbd-jateng-2023-antisipasi-ketidakpastian-global> pada tanggal 3 November 2022.

Jateng Prov.go.id, “Musrenbang 2022 dan RKPD 2023, Ini Prioritas Pemprov Jateng”, diakses dari <https://jatengprov.go.id/publik/musrenbang-2022-dan-rkpd-2023-ini-prioritas-pemprov-jateng/> pada tanggal 5 Januari 2023

5. Wawancara

Ferry Wawan Cahyono, Wawancara, Plh. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 4 Januari, 2023).

Dwianto Priyonugroho, Wawancara, Kepala Bidang Anggaran Provinsi Jawa Tengah, (Semarang: 21 Desember, 2022).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Riset DPRD Provinsi Jawa Tengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Setyo
Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275
Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206
Laman: www.fh.undip.ac.id Pos-el: fh@live.undip.ac.id

Nomor : 403 /UN7.F1/AK/XII/2022
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

09 DEC 2022

Yth. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.7, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitiandilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Merdeka Anggoro Putri
NIM : 11000119140691
alamat : Jl. Candi Prambanan Utara VI Kav. 823 Semarang
nomor HP : 082242281607
bidang minat : Hukum Tata Negara
judul skripsi : Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum
NIP 196711191993032002

Lampiran 2 Surat Ijin Riset BPKAD Provinsi Jawa Tengah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS HUKUM

Jalan dr. Antonius Suryo Kampus Univ
ersitas Diponegoro Tembalang
Semarang Kode Pos 50275
Telepon (024) 75918201 Fax (024) 75918206
Laman www.fh.undip.ac.id Pos-el fh@live.undip.ac.id

Nomor : 79 / UN7.FI/ AK/ I/ 2023
Lamp. :
Hal : Permohonan Riset/ Penelitian

18 JAN 2023

Yth. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.7, Mugassari, Kec. Semarang Selatan,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50249 Semarang

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program SI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian dilingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:

nama : Merdeka Anggoro Putri
NIM : 11000119140691
alamat : Jl. Candi Prambanan Utara VI Kav. 823 Semarang
nomor HP : 082242281607
bidang minat : Hukum Tata Negara
judul skripsi : Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196111191993032002

Lampiran 3 Surat Keterangan Riset DPRD Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Semarang Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman http : <http://www.jatengprov.go.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 16

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Lamidin, SH, MH
NIP : 19651110 199003 1 009
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Merdeka Anggoro Putri
NIM : 11000119140691
Jurusan : S1 Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan penelitian guna memperoleh data di DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang "Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah" di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, penelitian dilaksanakan pada Bulan Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 4 Januari 2023

Plh. SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA BAGIAN UMUM



Lamidin, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19651110 199003 1 009

Lampiran 4 Surat Keterangan Riset BPKAD Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614 Telepon 024- 8311174

Faksimile 024-8311172 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik bpkad@jatengprov.go.id

Semarang, 18 Januari 2023

Nomor : 159/003
Sifat : Blasa
Lampiran : -
Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth.

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
di -
S E M A R A N G

Menunjuk Surat Saudara Nomor 761/UN7.FI/AK/1/2023, perihal
Permohonan Riset/ Penelitian, bersama ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Merdeka Anggoro Putri
NIM : 11000119140691
Alamat : Jl Candi Prambanan Utara VI Kav. 823 Semarang
Nomor HP : 082242281607
Bidang Minat : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah
dalam Pembahasan dan Penetapan APBD Provinsi
Jawa Tengah.

Telah selesai melaksanakan penelitian guna memperoleh data dan
keterangan di BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Anggaran

DWANTO PRIYONUGROHO, M.Prof.Ac
Pembina Tingkat I
NIP. 19801221 200604 1 010

Lampiran 5 Data Pelaksanaan Penyusunan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun

JADWAL PENYUSUNAN APBD

NO	URAIAN	APBD MURNI 2019	APBD MURNI 2020	APBD MURNI 2021	APBD MURNI 2022	APBD MURNI 2023
1	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Kepada DPRD	21 Agustus 2018	09 Agustus 2019	17 Juli 2020	08 Oktober 2021	02 November 2022
2	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	12 November 2018	16 Agustus 2019	30 Juli 2020	18 Oktober 2021	16 November 2022
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	12 November 2018	19 Agustus 2019	11 Agustus 2020	18 Oktober 2021	16 November 2022
4	Penyusunan dan Pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	12 - 15 November 2018	19 - 30 Agustus 2019	12-18 Agustus 2020	18-20 Oktober 2021	16-20 November 2022
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	15 November 2018	09 Oktober 2019	15 September 2020	21 Oktober 2021	21 November 2022
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	29 November 2018	12 November 2019	14 Oktober 2020	28 Oktober 2021	24 November 2022
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	03 Desember 2018	14 November 2019	19 Oktober 2020	01 November 2021	28 November 2022
8	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	21 Desember 2018	06 Desember 2019	25 November 2020	22 November 2021	26 Desember 2022
9	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	27 Desember 2018	12 Desember 2019	04 Desember 2020	13 Desember 2021	30 Desember 2022
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	27 Desember 2018	17 Desember 2019	07 Desember 2020	15 Desember 2021	30 Desember 2022
11	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	15 Januari 2019	23 Desember 2019	18 Desember 2020	05 Januari 2022	04 Januari 2023

2019-2023